

HILIRISASI KELOMPOK TANI HUTAN DI KABUPATEN LAMONGAN

Choirul Anam¹, Martha Laila Arisandra², Khoirul Anam³

¹Fakultas Pertanian, Universitas Islam Darul 'Ulum, Jl. Airlangga 3 Sukodadi Lamongan

²Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Darul 'Ulum, Jl. Airlangga 3 Sukodadi Lamongan

Email: choirulanam@unisda.ac.id

³Bappelitbangda Lamongan, Jl. Basuki Rahmad No.1 Lamongan

Email: bidanglitbang.lamongan@gmail.com

ABSTRAK

Hilirisasi kelompok tani hutan di Kabupaten Lamongan merupakan upaya strategis untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani melalui diversifikasi produk hasil hutan dan pengembangan daya saing di pasar. Meskipun memiliki potensi besar, kelompok tani hutan menghadapi kendala dalam akses teknologi, pasar, dan sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi, hambatan, dan peluang hilirisasi guna mengoptimalkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, FGD, dan purposive sampling pada kelompok tani hutan di Kabupaten Lamongan. Data dianalisis dengan metode SWOT dan triangulasi untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam proses hilirisasi. Profil kelompok tani hutan di Kabupaten Lamongan menunjukkan variasi dalam jumlah anggota dan luas lahan yang dikelola, yang memengaruhi kapasitas hilirisasi dan pengelolaan sumber daya hutan. Produksi hasil hutan jati dan non-kayu memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi masih ada tantangan terkait teknologi, modal, dan akses pasar yang perlu diatasi melalui dukungan pemerintah dan keterlibatan pihak swasta. Dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi yang kuat, sektor hasil hutan di Kabupaten Lamongan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Hilirisasi, Kelompok Tani Hutan, Potensi Ekonomi, Pengembangan Berkelanjutan

ABSTRACT

Downstreaming of forest farmer groups in Lamongan Regency is a strategic effort to increase added value and farmer welfare through diversification of forest product products and development of competitiveness in the market. Despite having great potential, forest farmer groups face obstacles in access to technology, markets, and resources. This study aims to analyze the potential, obstacles, and opportunities for downstreaming in order to optimize sustainable forest management. This study uses a qualitative descriptive approach through in-depth interviews, FGDs, and purposive sampling of forest farmer groups in Lamongan Regency. Data were analyzed using the SWOT and triangulation methods to evaluate strengths, weaknesses, opportunities, and threats in the downstreaming process. The profile of forest farmer groups in Lamongan Regency shows variations in the number of members and the area of land managed, which affect the capacity of downstreaming and management of forest resources. The production of teak and non-timber forest products has great economic potential, but there are still challenges related to technology, capital, and market access that need to be overcome through government support and private sector involvement. With the right approach and strong collaboration, the forest product sector in Lamongan Regency can continue to grow and make a significant contribution to community welfare.

Keywords: Downstream, Forest Farmer Groups, Economic Potential, Sustainable Development

PENDAHULUAN

Hilirisasi sektor pertanian dan kehutanan menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan nilai tambah produk dan kesejahteraan petani. Dalam konteks Kabupaten Lamongan, kelompok tani hutan memiliki peran strategis dalam pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan yang berkelanjutan. Namun, potensi besar dari sumber daya hutan sering kali belum dioptimalkan karena terbatasnya akses terhadap teknologi, pasar, dan sumber daya lainnya. Proses hilirisasi diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok tani hutan melalui pengembangan produk turunan, diversifikasi usaha, dan peningkatan daya saing di pasar lokal maupun nasional (Elizabeth & Anugrah, 2020).

Kondisi geografis dan ekosistem hutan di Kabupaten Lamongan memberikan banyak peluang untuk pengembangan produk hasil hutan, baik berupa kayu maupun non-kayu, seperti tanaman obat, madu hutan, dan produk olahan lainnya. Akan tetapi, kelompok tani hutan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari minimnya pengetahuan teknis mengenai teknologi pasca panen, keterbatasan modal, hingga hambatan dalam mengakses pasar yang lebih luas (Syam, 2024). Oleh karena itu, diperlukan analisis menyeluruh terkait potensi dan hambatan dalam proses hilirisasi yang dilakukan oleh kelompok tani hutan di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek terkait pelaksanaan hilirisasi oleh kelompok tani hutan, mengidentifikasi potensi yang ada, serta mengevaluasi hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dari hasil hutan.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei - September 2024 di Kelompok Tani Hutan Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis potensi dan hambatan yang dihadapi oleh kelompok tani hutan dalam proses hilirisasi di Kabupaten Lamongan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) dengan para ketua dan anggota kelompok tani hutan,

serta stakeholder terkait seperti dinas kehutanan, lembaga pemerintah daerah, dan mitra swasta, juga wawancara langsung dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen kebijakan, laporan tahunan dinas kehutanan, serta kajian akademis sebelumnya mengenai hilirisasi dan pengelolaan hutan. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan tujuan memilih responden berdasarkan kemampuan dalam memberikan informasi tentang masalah dan tujuan penelitian. Analisis dilakukan dengan metode triangulasi, yang melibatkan verifikasi data dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi lapangan. Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam proses hilirisasi. Selain itu, analisis kebutuhan dilaksanakan untuk mengidentifikasi intervensi yang diperlukan bagi pengembangan hilirisasi yang efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Kelompok Tani Hutan

Profil kelompok tani hutan atau lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) Kabupaten Lamongan seperti Tabel 1. Tabel 1, memberikan gambaran tentang profil kelompok tani hutan atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Kabupaten Lamongan, yang diurutkan berdasarkan jumlah anggota dan luas lahan yang dikelola. Data ini mengindikasikan adanya potensi pengelolaan hutan oleh masyarakat setempat, serta variasi dalam kapasitas dan luas lahan yang tersedia di berbagai wilayah. Profil ini mencerminkan pola distribusi lahan dan jumlah anggota dalam kelompok tani hutan yang dapat berpengaruh pada efektivitas pengelolaan sumber daya hutan serta proses hilirisasi.

Jumlah Anggota dan Luas Lahan. Kelompok tani "Wono Joyo" di Desa Dagan, Kecamatan Solokuro, merupakan kelompok dengan jumlah anggota terbanyak (318 orang) dan mengelola luas lahan sebesar 550,40 hektar. Kelompok ini, seperti beberapa kelompok tani lainnya di

Solokuro, berpotensi memiliki struktur organisasi yang kuat dengan banyaknya Banyaknya anggota di kelompok tani ini juga mengindikasikan

adanya kapasitas sosial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan dan produktivitas hilirisasi. Di sisi lain, kelompok dengan jumlah anggota lebih sedikit, seperti "Bakti Pertiwi" di Desa Brengkok, Brondong, hanya memiliki 14 anggota tetapi mengelola lahan yang cukup luas (178,80 hektar). Meskipun jumlah anggotanya kecil, luas lahan yang cukup signifikan menunjukkan bahwa kelompok ini mungkin memiliki intensitas kerja yang lebih tinggi per

anggota, yang mendukung kelancaran kegiatan pengelolaan hutan (Ayu et al., 2013).

anggota, yang juga dapat mempengaruhi produktivitas dan efektivitas pengelolaan lahan mereka (Borner et al., 2017). Kelompok dengan jumlah anggota lebih sedikit mungkin menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, namun dengan lahan yang luas, mereka memiliki potensi untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil hutan jika didukung oleh teknologi dan pelatihan yang memadai.

Tabel 1. Kelompok tani hutan berdasar jumlah anggota terbanyak sampai terkecil (orang) beserta luas lahan (hektar) di Kabupaten Lamongan

No	Kecamatan/ Desa	Nama kelompok tani hutan/LMDH	Jumlah anggota (orang)	Luas lahan (Ha)
1	Solokuro; Dagan	Wono Joyo	318	550,40
2	Bluluk; Bluluk	Bluluk Mas	287	152,56
3	Bluluk; Bronjong	Karunia Mas	276	181
4	Solokuro; Solokuro	Wono Sakti	269	515,20
5	Ngimbang, Slaharwotan	Wono Lestari	244	135
6	Solokuro; Dadapan	Ande - Ande Lumut	222	1.401,8
7	Bluluk; Banjar Gondang	Tanah Mas	207	62,1
8	Brondong; Lembor	Hijau Lestari	188	607,30
9	Solokuro; Tebluru	Watu Telo	182	124,2
10	Sambeng; Sumbersari	Wana Lestari	164	121,5
11	Sambeng; Tampingrejo	Suromenggolo	151	125,5
12	Sambeng; Kreteranggon	Suromenggolo	151	125,5
13	Laren; Gelap	Wono Makmur	148	683,8
14	Mantup; Tunggu jagir	Sumber makmur	145	43,75
15	Laren; Dateng	Sumber Urip	137	610,4
16	Solokuro; Payaman	Barokah Sejati	125	396,30
17	Modo; Kedunglerep	Sumber Jaya	117	281,5
18	Sambeng; Wonorejo	Sumber tani makmur	107	48,15
19	Brondong; Sumberagung	Wono Jalasi	100	93,8
20	Laren; Gampang	Wono Asri	96	370,2
21	Solokuro; Takerharjo	Sudjiharjo	95	174,50
22	Ngimbang; Manungrejo	Sumber Marem	87	24,5
23	Laren; Plangwot	Harapan Jaya	83	634,2
24	Brondong; Sendangharjo	Wono Lestari	78	1.097,4
25	Sugio; Kalitengah	Sumbermakmur	71	41,35
26	Sambeng; Banyuasin	Wonokoyo II	51	11,3
27	Brondong; Sedayulawas	Ragas rejo	45	219,30
28	Paciran; Sendangagung	Wono Selo	32	53,10
29	Solokuro; Tenggulun	Kali Cendri	31	96,50
30	Brondong; Tlogoretno	Wono Raharjo	30	297,8
31	Mantup; Tugu	Tugu Lestari	17	7,4
32	Brondong; Brengkok	Bakti Pertiwi	14	178,80
Jumlah			4.426	9531,96

Hubungan antara Jumlah Anggota dan Luas Lahan. Dalam beberapa kasus, terdapat kelompok tani yang memiliki jumlah anggota besar namun mengelola lahan yang lebih kecil. Sebagai contoh, kelompok "Bluluk Mas" di Desa Bluluk, Kecamatan Bluluk, memiliki 287 anggota tetapi hanya mengelola lahan seluas 152,56 hektar. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok dengan anggota yang banyak tidak selalu berbanding lurus dengan luas lahan yang dikelola (Angelsen & Kaimowitz, 2001). Situasi ini disebabkan oleh distribusi lahan yang terbatas atau kepemilikan lahan yang lebih kecil di daerah tersebut. Sebaliknya, kelompok dengan anggota sedikit dapat memiliki akses ke lahan yang lebih luas, seperti "Wono Lestari" di Desa Sendangharjo, Kecamatan Brondong, yang memiliki 78 anggota namun mengelola 1.097,4 hektar lahan.

Pentingnya Luas Lahan dalam Hilirisasi. Luas lahan yang dikelola oleh kelompok tani hutan menjadi faktor penting dalam keberhasilan hilirisasi produk hasil hutan. Kelompok yang mengelola lahan luas, seperti "Ande-Ande Lumut" di Dadapan, Solokuro (1.401,8 hektar), memiliki potensi lebih besar untuk mengembangkan berbagai produk hasil hutan dan memaksimalkan pemanfaatan lahan. Sebaliknya, kelompok dengan lahan lebih kecil memerlukan strategi yang lebih fokus untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan meningkatkan produktivitas (Nerfa et al., 2020). Luas lahan yang besar memberikan kesempatan bagi kelompok tani untuk menerapkan strategi diversifikasi produk, seperti agroforestri, yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus melestarikan hutan.

Kendala dalam Pengelolaan Kelompok Tani Hutan. Kelompok tani hutan yang memiliki anggota banyak menghadapi kendala dalam hal koordinasi dan pengelolaan sumber

Tabel 2, menunjukkan volume produksi hasil hutan jati di Kabupaten Lamongan pada tahun 2023, yang dikelola di berbagai kecamatan. Data ini menggambarkan kontribusi masing-masing kecamatan terhadap total produksi hasil hutan jati di wilayah tersebut. Volume total produksi mencapai 2.339 m³, yang tersebar di 17 kecamatan, dengan variasi signifikan antara kecamatan yang satu dengan yang lain.

Distribusi Produksi Hasil Hutan Jati. Kecamatan Lamongan menempati posisi teratas dengan volume produksi sebesar 203 m³,

daya manusia. Banyaknya anggota dapat menjadi tantangan dalam hal distribusi peran dan tanggung jawab. Sebaliknya, kelompok dengan anggota sedikit menghadapi masalah kekurangan tenaga kerja untuk mengelola lahan yang luas, yang dapat membatasi produktivitas mereka (Colfer, 2010). Oleh karena itu, penting bagi setiap kelompok tani untuk mengembangkan struktur organisasi yang efektif dan meningkatkan keterampilan manajerial untuk mengatasi berbagai kendala yang ada.

2. Produksi Hasil Hutan Jati

Volume produksi hasil hutan jati di Kabupaten Lamongan tersebar pada 17 Kecamatan seperti pada Tabel 2 ini.

Tabel 2. Perkembangan volume produksi hasil hutan Jati kabupaten Lamongan, 2023

No	Kecamatan	Produksi hasil hutan jati (M ³)
1	Lamongan	203
2	Karanggeneng	201
3	Sukorame	194
4	Sarirejo	184
5	Sugio	183
6	Kalitengah	172
7	Sambeng	160
8	Kedungpring	158
9	Ngimbang	153
10	Kembangbahu	150
11	Solokuro	149
12	Bluluk	141
13	Turi	138
14	Modo	128
15	Mantup	122
16	Sukodadi	115
17	Tikung	13
Jumlah		2339

Sumber: Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Bojonegoro, 2024

diikuti oleh Karanggeneng (201 m³) dan Sukorame (194 m³). Ketiga kecamatan ini berkontribusi besar terhadap total produksi kayu jati di kabupaten tersebut. Kontribusi yang lebih tinggi dari beberapa kecamatan ini kemungkinan berkaitan dengan faktor-faktor seperti kondisi lahan, kelembagaan hutan yang kuat, dan akses terhadap teknologi pengelolaan hutan yang memadai (Ayu et al., 2015). Kecamatan dengan produksi yang lebih besar juga memiliki program kehutanan yang lebih baik atau manajemen yang lebih efektif dalam

mengelola hutan jati. Sebaliknya, Kecamatan Tikung hanya menyumbang 13 m³, yang menjadi volume produksi terendah di antara semua kecamatan. Ini dapat menunjukkan adanya keterbatasan dalam akses lahan jati, teknologi pengelolaan yang kurang memadai, atau tantangan lain seperti keterbatasan tenaga kerja atau modal di wilayah tersebut (Angelsen & Kaimowitz, 2001). Kecamatan-kecamatan dengan produksi rendah, seperti Tikung dan Sukodadi (115 m³), memerlukan intervensi tambahan dalam hal peningkatan kapasitas manajemen hutan atau akses terhadap teknologi pengolahan kayu.

Pentingnya Produksi Jati bagi Perekonomian Lokal. Kayu jati memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga produksi hutan jati menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi masyarakat di Kabupaten Lamongan. Produksi jati yang tinggi, seperti yang terlihat di kecamatan-kecamatan seperti Lamongan, Karanggeneng, dan Sukorame, kemungkinan besar memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal, baik melalui peningkatan lapangan kerja maupun melalui perdagangan kayu jati (Borner et al., 2017). Pengelolaan yang baik terhadap sumber daya hutan jati dapat berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Namun, tantangan juga tetap ada dalam memastikan produksi yang berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat lokal dan penerapan konsep pengelolaan hutan berkelanjutan menjadi penting agar produksi kayu jati dapat berlangsung tanpa merusak ekosistem hutan (Nerfa et al., 2020). Oleh karena itu, kecamatan-kecamatan dengan produksi jati yang tinggi perlu mengedepankan strategi yang mengutamakan keberlanjutan agar tidak terjadi penurunan produksi di masa mendatang akibat deforestasi atau eksploitasi berlebih.

Variasi dalam Volume Produksi. Terlihat adanya variasi yang cukup signifikan

antara kecamatan yang satu dengan yang lain. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketersediaan lahan, kondisi lingkungan, dan tingkat penerapan teknologi serta praktik pengelolaan hutan (Colfer, 2010). Kecamatan-kecamatan seperti Sukorame, Karanggeneng, dan Lamongan yang memiliki volume produksi tinggi mungkin memiliki akses yang lebih baik terhadap lahan subur, tenaga kerja terlatih, serta infrastruktur yang mendukung hilirisasi produk kayu jati.

Di sisi lain, kecamatan dengan volume produksi yang lebih rendah, seperti Tikung dan Sukodadi, mungkin memerlukan perhatian lebih dalam hal pemberdayaan sumber daya manusia dan perbaikan infrastruktur. Pemerintah daerah dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kecamatan-kecamatan dengan produksi rendah mendapatkan akses yang lebih baik terhadap teknologi pengelolaan hutan dan dukungan modal untuk meningkatkan produktivitas mereka (Angelsen & Kaimowitz, 2001).

3. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu

Produksi hasil hutan bukan kayu di Kabupaten Lamongan pada tahun 2024 jumlahnya 13.767 Kg yang terdiri dari 4 macam seperti pada Tabel 3. Tabel 3, menyajikan perkembangan volume produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) di Kabupaten Lamongan pada tahun 2023, yang meliputi beberapa jenis produk seperti bambu batang, jamur tiram, lebah madu (Apis mellifera), dan lebah madu cerana (Apis cerana). Total volume produksi dari berbagai komoditas HHBK mencapai 13.767 kg, dengan kontribusi terbesar berasal dari bambu batang (8.752 kg), diikuti oleh jamur tiram (3.492 kg), lebah madu (480 kg), dan lebah madu cerana (1.043 kg). Data ini berasal dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Bojonegoro (2024).

Tabel 3. Perkembangan volume produksi hasil hutan bukan kayu (Kg) kabupaten Lamongan, 2023

No	Kecamatan	Volume produksi Hasil hutan bukan kayu (Kg)				Jumlah
		Bambu batang	Jamur tiram	Lebah madu	Lebah madu cerana	
1	Kedungpring	617	792		472	1881
2	Modo	982	535	52		1569
3	Sukodadi	1167				1167
4	Mantup	582	310	128		1020
5	Solokuro	597	273	24		894
6	Kembangbahu	437	424	20		881

7	Ngimbang	422	370	49		841
8	Kalitengah	752				752
9	Bluluk	305	32	32	312	681
10	Sarirejo	242	428			670
11	Paciran	605				605
12	Sukorame	403		30		433
13	Karanggeneng	432				432
14	Sambeng	373		52		425
15	Brondong			86	259	345
16	Turi	337				337
17	Sugio		328	7		335
18	Tikung	272				272
19	Lamongan	227				227
	Jumlah	8752	3492	480	1043	13767

Sumber: Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Bojonegoro, 2024

Distribusi Produksi HHBK di Kabupaten Lamongan. Kecamatan Kedungpring dan Modo mencatat volume produksi HHBK tertinggi, masing-masing dengan total produksi sebesar 1.881 kg dan 1.569 kg. Produksi terbesar di Kedungpring berasal dari jamur tiram dan bambu batang, sedangkan di Modo, selain bambu batang, terdapat pula kontribusi dari produksi lebah madu (52 kg). Kedua kecamatan ini menunjukkan keberagaman produk HHBK yang dihasilkan, yang mengindikasikan potensi agroforestri yang lebih tinggi dan sistem manajemen sumber daya hutan yang baik (Arnold & Pérez, 2001).

Sementara itu, kecamatan seperti Lamongan dan Tikung memiliki volume produksi paling rendah, masing-masing dengan total produksi hanya 227 kg dan 272 kg. Hal ini mungkin menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya hutan atau akses terbatas ke teknologi dan pelatihan dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (Macdicken, 2015). Rendahnya produksi di beberapa kecamatan juga dapat mengindikasikan perlunya dukungan tambahan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada.

Produksi Bambu sebagai Komoditas Utama. Bambu batang merupakan komoditas HHBK dengan volume produksi tertinggi di Kabupaten Lamongan, mencapai total 8.752 kg. Kecamatan Sukodadi mencatat volume tertinggi dengan 1.167 kg, diikuti oleh Modo (982 kg) dan Kedungpring (617 kg). Bambu sebagai salah satu HHBK memiliki nilai ekonomi yang penting dalam berbagai industri, seperti bahan bangunan, kerajinan tangan, dan produk rumah tangga (Scurlock et al., 2000). Dengan produksi bambu yang tinggi,

kecamatan-kecamatan ini memiliki potensi ekonomi besar dari hasil hutan bukan kayu, khususnya dalam pemanfaatan bambu sebagai bahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kecamatan Kalitengah juga mencatat produksi bambu yang cukup tinggi (752 kg), meskipun tidak menunjukkan keberagaman produk HHBK lainnya seperti yang terlihat di beberapa kecamatan lain. Ini dapat menjadi indikasi bahwa kecamatan ini fokus pada satu komoditas utama, yakni bambu, tanpa eksplorasi lebih jauh terhadap potensi HHBK lainnya seperti madu atau jamur (Belcher et al., 2005).

Produksi Lebah Madu dan Jamur Tiram. Lebah madu, baik *Apis mellifera* maupun *Apis cerana*, juga merupakan bagian penting dari hasil hutan bukan kayu yang diproduksi di beberapa kecamatan. Kecamatan Bluluk mencatat volume produksi tertinggi untuk lebah madu cerana (312 kg), yang merupakan lebah lokal dengan potensi produksi madu yang besar dalam ekosistem lokal (Bradbear, 2009). Kecamatan Brondong juga mencatat volume yang signifikan untuk lebah madu cerana dengan 259 kg. Pengembangan lebah madu cerana ini penting karena jenis lebah ini mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan lokal dan berkontribusi terhadap keberlanjutan ekosistem melalui penyerbukan tanaman (MacDicken, 2015).

Jamur tiram menjadi salah satu produk HHBK unggulan di beberapa kecamatan, dengan Kedungpring mencatat volume produksi tertinggi sebesar 792 kg, diikuti oleh Modo (535 kg) dan Sarirejo (428 kg). Jamur tiram memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dan merupakan produk pangan yang memiliki

permintaan besar di pasar (Hall et al., 2003). Pengembangan produksi jamur tiram di berbagai kecamatan ini menunjukkan adanya diversifikasi komoditas HHBK, yang bisa berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi masyarakat hutan di Kabupaten Lamongan.

Peran dan Tantangan Pengembangan HHBK. Produksi hasil hutan bukan kayu di Kabupaten Lamongan memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat sekitar hutan. Produk-produk seperti bambu, jamur tiram, dan madu memberikan sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Namun, terdapat tantangan dalam hal akses pasar, teknologi, dan pelatihan yang dapat memaksimalkan potensi HHBK di seluruh kecamatan. Kecamatan-kecamatan dengan produksi rendah mungkin membutuhkan dukungan lebih dalam hal peningkatan kapasitas, akses terhadap teknologi pengolahan, dan penguatan kelembagaan (MacDicken, 2015).

Selain itu, diversifikasi produk HHBK dapat menjadi strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan. Kecamatan-kecamatan yang mengandalkan satu jenis produk, seperti Kalitengah yang hanya menghasilkan bambu, mungkin menghadapi risiko ekonomi jika pasar untuk komoditas tersebut menurun (Arnold & Pérez, 2001). Oleh karena itu, pengembangan berbagai jenis produk HHBK di setiap kecamatan perlu didorong untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

4. Analisis Potensi dan Hambatan Hilirisasi Kelompok Tani Hutan

Berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh 50 responden dari Kelompok Tani Hutan di Kabupaten Lamongan, terdapat sejumlah poin penting terkait potensi hilirisasi hasil hutan, hambatan yang dihadapi, serta usulan untuk perbaikan kebijakan. Diskusi ini membahas beberapa aspek utama dari potensi hilirisasi dan kendala yang perlu diatasi, serta peran penting yang bisa dimainkan oleh berbagai pemangku kepentingan.

a. Potensi Hilirisasi

Potensi Hasil Hutan. Sebagian besar responden, yaitu 80% (40 dari 50 responden), menilai bahwa potensi hasil hutan yang dimiliki oleh kelompok tani mereka untuk diolah lebih lanjut tergolong "sangat besar" atau "cukup besar". Hal ini menunjukkan bahwa sumber

daya hutan yang ada di Kabupaten Lamongan, cukup melimpah dan berpotensi menjadi komoditas bernilai tambah melalui proses hilirisasi (Adam et al., 2013). Tingginya potensi ini membuka peluang besar bagi kelompok tani untuk mengembangkan produk-produk hasil hutan yang lebih variatif, seperti kayu olahan dan produk non-kayu.

Akses Terhadap Teknologi. Hampir setengah dari responden menyatakan bahwa akses teknologi pengolahan hasil hutan sudah "sangat memadai" (40%) atau "cukup memadai" (32%). Namun, terdapat 8% yang menilai akses teknologi kurang memadai. Keterbatasan akses teknologi ini dapat menghambat kemampuan kelompok tani dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produk hasil hutan mereka. Menurut literatur, teknologi modern sangat penting dalam meningkatkan efisiensi pengolahan dan daya saing produk di pasar (Zenteno et al., 2018).

Dukungan Pemerintah. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 86% responden merasa dukungan dari pemerintah daerah masih berada pada tingkat "sedang" atau lebih rendah, bahkan 5 responden menyatakan bahwa tidak ada dukungan sama sekali. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dan peningkatan keterlibatan pemerintah dalam mendukung hilirisasi hasil hutan, baik dalam bentuk regulasi, penyediaan infrastruktur, maupun dukungan teknis dan finansial (Peluso, 1992). Ketidackukupan dukungan pemerintah ini seringkali menjadi hambatan signifikan bagi kelompok tani dalam mengembangkan bisnis hilirisasi mereka.

Agroforestri sebagai Solusi. Mayoritas responden, sekitar 80%, setuju bahwa agroforestri, yaitu kombinasi antara tanaman hutan dan tanaman pertanian, dapat meningkatkan potensi hilirisasi kelompok tani. Sistem agroforestri memungkinkan kelompok tani untuk mendiversifikasi produk yang dihasilkan dan memanfaatkan lahan secara lebih berkelanjutan. Selain itu, agroforestri juga dapat membantu mengurangi risiko terkait perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan ekonomi petani (Garrett et al., 2020).

Potensi Pasar. Sebanyak 80% responden menilai bahwa potensi pasar untuk produk hasil olahan hutan di Kabupaten Lamongan cukup besar atau sangat besar. Meskipun demikian, masih ada beberapa responden yang menilai potensi pasar ini

sedang hingga kecil. Ini menandakan bahwa kelompok tani masih menghadapi tantangan dalam memperluas akses pasar dan memastikan distribusi produk yang lebih efisien (Angelsen & Kaimowitz, 2001). Perlu adanya peningkatan strategi pemasaran dan dukungan pemerintah dalam menghubungkan kelompok tani dengan pasar yang lebih luas.

b. Hambatan Hilirisasi

Keterbatasan Modal. Sebanyak 80% responden menyatakan bahwa keterbatasan modal merupakan salah satu hambatan utama dalam proses hilirisasi. Keterbatasan modal ini membatasi kemampuan kelompok tani dalam berinvestasi pada teknologi, infrastruktur, dan pengembangan usaha. Hal ini sejalan dengan temuan dari literatur yang menyatakan bahwa akses terhadap modal sangat krusial dalam mempercepat proses hilirisasi dan meningkatkan produktivitas kelompok tani kecil (Mayers & Vermeulen, 2002).

Akses Pasar. Masalah akses pasar juga diidentifikasi sebagai hambatan besar oleh 80% responden. Kesulitan dalam mengakses pasar dapat disebabkan oleh kurangnya jaringan distribusi dan keterbatasan dalam mempromosikan produk hasil hutan kepada konsumen. Hambatan ini berdampak pada rendahnya pendapatan kelompok tani dan sulitnya memperluas skala usaha (Nerfa et al., 2020).

Pelatihan dan Penyuluhan. Sebagian besar responden merasa bahwa pelatihan dan penyuluhan yang diberikan sudah cukup memadai. Namun, ada 8% responden yang menilai bahwa pelatihan ini masih kurang memadai. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan intensitas dan kualitas pelatihan agar kelompok tani dapat mengembangkan keterampilan mereka dalam mengelola hilirisasi produk hutan (Marginnis & Sayer, 2013).

Teknologi Tradisional. Sebanyak 80% responden setuju bahwa teknologi tradisional masih menjadi penghambat dalam peningkatan produktivitas kelompok tani. Penggunaan teknologi yang kurang efisien dapat membatasi kapasitas produksi serta kualitas hasil hutan olahan. Oleh karena itu, modernisasi teknologi menjadi salah satu solusi utama untuk meningkatkan daya saing kelompok tani (Colfer, 2010).

Perubahan Iklim. Perubahan iklim atau cuaca yang tidak menentu juga disebutkan sebagai hambatan oleh mayoritas responden

(80%). Fluktuasi cuaca dapat mempengaruhi keberhasilan panen dan kelangsungan usaha hilirisasi. Oleh karena itu, kelompok tani perlu mengadopsi strategi mitigasi risiko iklim, seperti diversifikasi tanaman dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan (Sikor & Stahl, 2012).

5. Analisis SWOT

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan, berikut adalah rangkuman kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam proses hilirisasi kelompok tani hutan di Kabupaten Lamongan: 1) **Kekuatan (Strengths):** Keberagaman hasil hutan yang tinggi, Dukungan pemerintah daerah melalui program penyuluhan dan pelatihan, Kesesuaian ekologi untuk pengembangan agroforestri; 2) **Kelemahan (Weaknesses):** Keterbatasan akses terhadap teknologi modern, Modal yang terbatas untuk pengembangan usaha hilir, Keterampilan pengolahan pasca-panen yang masih rendah; 3) **Peluang (Opportunities):** Permintaan pasar yang meningkat untuk produk hasil hutan yang berkelanjutan, Potensi pengembangan industri kecil menengah (IKM) berbasis hasil hutan non-kayu, Inovasi produk turunan yang bisa menciptakan nilai tambah; 4) **Ancaman (Threats):** Persaingan dengan produk sejenis dari daerah lain yang memiliki akses pasar lebih baik, Kerentanan terhadap perubahan kebijakan pemerintah dan kondisi iklim yang tidak menentu, Ketergantungan pada teknologi tradisional yang menurunkan efisiensi produksi.

Proses hilirisasi oleh kelompok tani hutan di Kabupaten Lamongan menunjukkan potensi yang besar dalam meningkatkan nilai tambah hasil hutan, namun masih menghadapi sejumlah tantangan. Potensi alam dan dukungan dari pemerintah daerah perlu dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas teknis dan akses terhadap teknologi pengolahan. Inisiatif untuk memperluas akses pasar, baik secara lokal maupun nasional, juga harus diprioritaskan guna meningkatkan daya saing produk.

Strategi penguatan kelembagaan kelompok tani hutan, melalui pengembangan koperasi atau kemitraan dengan pihak swasta, bisa menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan modal dan infrastruktur. Selain itu, pengembangan produk turunan yang lebih inovatif dan sesuai dengan permintaan pasar juga dapat mempercepat proses hilirisasi (Haryanto, 2020).

KESIMPULAN

1. Secara keseluruhan, profil kelompok tani hutan di Kabupaten Lamongan menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam jumlah anggota dan luas lahan yang dikelola. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kapasitas kelompok dalam mengelola sumber daya hutan dan proses hilirisasi. Kelompok dengan luas lahan besar memiliki potensi lebih besar untuk pengembangan hilirisasi, tetapi juga memerlukan dukungan dalam hal teknologi, akses pasar, dan modal. Sementara itu, kelompok dengan anggota banyak tetapi lahan kecil perlu mengoptimalkan sumber daya manusia dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, dan pihak swasta dapat membantu mengatasi kendala yang ada dan memperkuat pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
2. Produksi hasil hutan jati di Kabupaten Lamongan tahun 2023 menunjukkan variasi yang signifikan antar kecamatan, dengan beberapa kecamatan seperti Lamongan, Karanggeneng, dan Sukorame menjadi penyumbang utama volume produksi. Kontribusi jati terhadap perekonomian lokal sangat besar, terutama di daerah dengan produksi tinggi. Namun, beberapa kecamatan dengan volume produksi yang rendah mungkin membutuhkan intervensi tambahan untuk meningkatkan produktivitas, seperti peningkatan akses terhadap teknologi, infrastruktur, dan modal. Dengan manajemen yang baik dan pendekatan berkelanjutan, Kabupaten Lamongan memiliki potensi untuk terus mengembangkan sektor hasil hutan jati sebagai salah satu andalan ekonomi daerah.
3. Hasil hutan bukan kayu memiliki potensi ekonomi yang besar di Kabupaten Lamongan, terutama dalam produksi

bambu, jamur tiram, dan madu. Kecamatan-kecamatan seperti memaksimalkan potensi HHBK mereka. Dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan kebijakan, sektor HHBK di Kabupaten Lamongan dapat terus berkembang, memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Kedungpring, Modo, dan Sukodadi menonjol dalam hal volume produksi, sementara kecamatan lain masih menghadapi tantangan.

4. Potensi hilirisasi hasil hutan di Kabupaten Lamongan sangat besar, namun terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan modal, akses pasar, dan teknologi. Dukungan pemerintah dan keterlibatan pihak swasta sangat diperlukan untuk mempercepat proses hilirisasi dan meningkatkan kesejahteraan kelompok tani hutan.

REKOMENDASI

Peningkatan Akses Teknologi: Pemda perlu memfasilitasi pelatihan dan penyuluhan bagi kelompok tani mengenai teknologi pertanian dan pengelolaan hasil hutan yang modern.

Pengembangan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur transportasi dan fasilitas penyimpanan hasil hutan harus diprioritaskan untuk mendukung distribusi produk yang lebih baik.

Fasilitasi Akses Pasar: Pengembangan program pemasaran yang dapat mempertemukan kelompok tani dengan konsumen dan pasar yang lebih luas.

Dukungan Modal dan Pembiayaan: Pemda dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan skema pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh kelompok tani.

Kolaborasi dengan Pihak Swasta: Mendorong kemitraan antara kelompok tani dan perusahaan swasta untuk meningkatkan inovasi dan pengembangan produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Y. O., Pretzsch, J., & Pettenella, D. (2013). Contribution of Non-Timber Forest Products livelihood strategies to rural development in drylands of Sudan: Potentials and failures. *Agricultural Systems*, 117, 90-97.
- Angelsen, A., & Kaimowitz, D. (2001). *Introduction: the role of agricultural technologies in tropical deforestation*. In *Agricultural technologies and tropical deforestation* (pp. 1-17). Wallingford UK: CAB International.
- Arnold, J. M., & Pérez, M. R. (2001). Can non-timber forest products match tropical forest conservation and development objectives?. *Ecological economics*, 39(3), 437-447.
- Belcher, B., Ruiz-Pérez, M., & Achdiawan, R. (2005). Global patterns and trends in the use and management of commercial NTFPs: implications for livelihoods and conservation. *World Development*, 33(9), 1435-1452.
- Börner, J., Baylis, K., Corbera, E., Ezzine-de-Blas, D., Honey-Rosés, J., Persson, U. M., & Wunder, S. (2017). The effectiveness of payments for environmental services. *World development*, 96, 359-374.
- Bradbeer, N. (2009). *Bees and their role in forest livelihoods: A guide to the services provided by bees and the sustainable harvesting, processing and marketing of their products*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Colfer, C. J. (2010). *The complex forest: communities, uncertainty, and adaptive collaborative management*. Routledge.
- Elizabeth, R., & Anugrah, I. S. (2020). Akselerasi hilirisasi produk agroindustri berdayasaing mendongkrak kesejahteraan petani dan ekonomi pedesaan. *Jurnal Mimbar Agribisnis*, 6(2), 890-918.
- Garrett, R. D., Rueda, X., & Lambin, E. F. (2020). "Sustainable Commodity Supply Chains in the Tropics." *Nature Climate Change*, 10(5), 370-375.
- Hall, I. R., Stephenson, S. L., Buchanan, P. K., Cole, A. L., & Yun, W. (2003). *Edible and poisonous mushrooms of the world* (Vol. 372). Portland: Timber Press.
- Haryanto, T. (2020). Hilirisasi produk pertanian: Peluang dan tantangan di era modern. *Agrikultura Indonesia*, 23(3), 56-68.
- MacDicken, K. G. (2015). *Global forest resources assessment 2015: what, why and how?*. *Forest Ecology and Management*, 352, 3-8.
- Mayers, J., & Vermeulen, S. (2002). Company-community forestry partnerships: From raw deals to mutual gains. *International Institute for Environment and Development, London*.
- Maginnis, S., & Sayer, J. A. (2013). *Forests in landscapes: ecosystem approaches to sustainability*. Routledge.
- Nerfa, L., Rhemtulla, J. M., & Zerriffi, H. (2020). Forest dependence is more than forest income: Development of a new index of forest product collection and livelihood resources. *World Development*, 125, 104689.
- Peluso, N. L. (1992). The political ecology of extraction and extractive reserves in East Kalimantan, Indonesia. *Development and change*, 23(4), 49-74.
- Scurlock, J. M., Dayton, D. C., & Hames, B. (2000). Bamboo: an overlooked biomass resource?. *Biomass and bioenergy*, 19(4), 229-244.
- Sikor, T., & Stahl, J. (Eds.). (2012). *Forests and people: property, governance, and human rights*. Routledge.
- Syam, R. (2024). *Analisis Potensi Pengembangan Bidang Agroforestri Berbasis Agribisnis Di Kawasan Hutan Alitta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Parepare).
- Zenteno, M., Zuidema, P. A., de Jong, W., & Boot, R. G. (2013). Livelihood strategies and forest dependence: New insights from Bolivian forest communities. *Forest Policy and Economics*, 26, 12-21.